

**GENDER, RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK;
STUDI KOMPARATIF PADA WAJIB PAJAK DAN MAHASISWA**

Sintia Rahmadani¹, Vita Fitria Sari²

sintiarahmadannii@gmail.com¹, vitafitriasari@fe.unp.ac.id²,

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Penulis Korespondensi

Diunggah: Maret 2026

Diterima: September 2026

Dipublikasi: September 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan gender dan religiusitas dengan kecenderungan penggelapan pajak serta membandingkan pola hasil antara wajib pajak dan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Sampel penelitian terdiri dari 303 partisipan, yaitu 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa. Data dianalisis menggunakan *two-way ANOVA* yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok untuk menguji hubungan gender, religiusitas, dan interaksi keduanya dengan kecenderungan penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dan religiusitas berhubungan secara signifikan dengan kecenderungan penggelapan pajak pada kedua kelompok. Selain itu, terdapat interaksi yang signifikan antara gender dan religiusitas pada kelompok wajib pajak maupun mahasiswa. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan pola hasil yang konsisten antara kedua kelompok, meskipun konsistensi tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti kesetaraan statistik antara wajib pajak dan mahasiswa.

Kata Kunci: *Gender; Religiusitas; Penggelapan Pajak.*

Abstract

This study aims to analyze the relationship of gender and religiosity with the propensity for tax evasion and to compare the patterns of results between taxpayers and university students. The study employs a quantitative approach with a comparative design. The sample consists of 303 participants: 50 taxpayers and 253 students. Data were analyzed using two-way ANOVA, conducted separately for each group, to examine the relationships of gender, religiosity, and their interaction with the propensity for tax evasion. The results indicate that gender and religiosity are significantly associated with the propensity for tax evasion in both groups. Furthermore, a significant interaction between gender and religiosity was observed in both the taxpayer and student groups. Overall, the study reveals consistent patterns of results across both groups, although this consistency cannot be interpreted as evidence of statistical equivalence between taxpayers and students.

Keywords: *Gender; Religiosity; Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dibuktikan dengan persentase kontribusi pajak dari APBN pada tahun 2023 yaitu 98,9% (Satriya, 2024). Namun, pentingnya penerimaan pajak masih menghadapi tantangan utama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah ini dibuktikan dengan rasio pajak yang rendah sebesar 10,31% dimana rasio ini sangat rendah jika kita bandingkan dengan rasio pajak negara berkembang yang memiliki rata-rata rasio pajak sebesar 27,8%. yang memiliki rata-rata rasio pajak sebesar 27,8%. Selain dari rasio pajak yang rendah, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi ini diduga karena sistem *self-assessment* yang dianut di Indonesia, sehingga wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga pada perilaku dan keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu bentuk perilaku yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan melalui tindakan seperti penyembunyian informasi, pelaporan yang tidak benar, atau penghilangan catatan yang relevan (Fisher, 2014; Kirchler et al., 2003). Penelitian tentang penggelapan pajak ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti melalui prespektif ekonomi. Beberapa peneliti terdahulu banyak mengambil perspektif ekonomi, keuangan, dan aspek hukum terhadap penggelapan pajak. Menurut Nasyaduk & McGee, (2006) penggelapan pajak disebabkan dari perspektif ekonomi dan keuangan dikarenakan para ekonom bersifat utilitarian, Allingham & Sandmo, (1972) dan (Slemrod, 2007) melihat penggelapan pajak dari perspektif ekonomi dan penegakan hukum. Aneyaw. et al., (2016) menilai bahwa pendekatan ekonomi tidak berhasil untuk memberikan wawasan atau pengetahuan mendalam tentang penggelapan pajak.

Psikolog dan ekonom menyadari bahwa paradigma penelitian konvensional dengan pendekatan ekonomi masih memiliki kekurangan. (Farrar et al., 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi dan penegakan hukum telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak, tetapi pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan dimensi psikologis dan sosial yang melandasi keputusan individu untuk melakukan atau menghindari penggelapan pajak. Berbeda dengan *tax avoidance* yang memanfaatkan ketentuan hukum untuk meminimalkan kewajiban pajak, *tax evasion* melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, penggelapan pajak tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga merupakan persoalan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana individu mengevaluasi risiko, norma, dan aspek etis dari keputusan perpajakan. Perhatian terhadap faktor psikologis dan sosial menjadi penting karena keputusan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan manfaat ekonomi dan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran. Individu dapat memberikan respons yang berbeda terhadap situasi perpajakan yang sama karena memiliki karakteristik sosial dan nilai personal yang berbeda. Dua faktor yang relevan dalam konteks tersebut adalah *gender* dan religiusitas.

Gender telah banyak dikaji sebagai karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan dalam pengambilan keputusan, persepsi risiko, dan evaluasi etis. Kastlunger et al., (2010), misalnya, menunjukkan bahwa karakteristik gender berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap perilaku yang berkaitan dengan etika dan pengambilan risiko.

Namun, temuan empiris mengenai hubungan gender dengan penggelapan pajak masih belum konsisten. Helmy et al., (2021) menemukan adanya pengaruh gender terhadap penggelapan pajak, sementara penelitian lain menemukan bahwa gender tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam perilaku perpajakan (Pasaribu & Tjen, 2016; Zakaria, 2019). Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gender dan penggelapan pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain gender, religiusitas merupakan faktor psikologis dan sosial yang berpotensi membentuk perilaku etis individu. Religiusitas mencerminkan tingkat keyakinan, komitmen, pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan individu terhadap nilai-nilai agama (Basri, 2015; Boone et al., 2013). Nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman internal dalam mengevaluasi perilaku yang dianggap benar atau salah. Pada konteks perpajakan, individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi secara teoritis dapat memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma moral dan hukum. Sejalan dengan argumentasi tersebut, (Pope & Mohdali, 2010) menunjukkan keterkaitan religiusitas dengan *tax morale* dan kepatuhan pajak. Namun, bukti empiris mengenai hubungan religiusitas dan penggelapan pajak juga belum konsisten. Penelitian (McKerchar et al., 2013; Welch et al., 2005) tidak menemukan hubungan yang signifikan, sementara Khalil & Sidani, (2020) menunjukkan bahwa religiusitas bukan merupakan penjabar utama sikap terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk memahami kapan dan dalam kondisi bagaimana religiusitas berkaitan dengan kecenderungan penggelapan pajak.

Permasalahan lain yang penting dalam berbagai penelitian keprilaku terutama perpajakan adalah penggunaan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Penggunaan mahasiswa sering dilakukan karena akses terhadap responden relatif mudah, tetapi terdapat perbedaan karakteristik yang penting antara mahasiswa dan wajib pajak aktual. Mahasiswa cenderung lebih muda, memiliki pengalaman perpajakan yang terbatas, dan belum sepenuhnya menghadapi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan wajib pajak memiliki pengalaman langsung dengan sistem perpajakan (Marriott, 2013). Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana temuan yang diperoleh dari mahasiswa dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Meskipun penelitian sebelumnya telah menggunakan mahasiswa dalam penelitian perpajakan, penggunaan mahasiswa sebagai representasi wajib pajak tetap menjadi isu metodologis yang perlu mendapatkan perhatian. Pada saat yang sama, penggunaan wajib pajak sebagai responden juga menghadapi kendala karena informasi mengenai kewajiban dan pembayaran pajak bersifat sensitif dan perilaku penggelapan pajak sulit diamati secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua *research gaps* yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, penelitian mengenai gender dan religiusitas dalam menjelaskan penggelapan pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai kedua faktor tersebut dan kemungkinan interaksinya dalam membentuk kecenderungan penggelapan pajak. Kedua, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah pola hubungan tersebut menunjukkan pola yang serupa ketika penelitian dilakukan pada wajib pajak aktual dibandingkan dengan mahasiswa. Dengan demikian, membandingkan kedua kelompok menjadi penting tidak hanya untuk memahami perilaku perpajakan, tetapi juga untuk mengevaluasi relevansi penggunaan mahasiswa dalam penelitian mengenai perilaku wajib pajak.

Berdasarkan kedua kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan gender dan religiusitas dengan kecenderungan penggelapan pajak serta membandingkan pola hasil yang diperoleh dari kelompok wajib pajak dan mahasiswa. Secara khusus, penelitian ini menganalisis perbedaan kecenderungan penggelapan pajak berdasarkan gender, perbedaan berdasarkan tingkat religiusitas, serta interaksi antara gender dan religiusitas pada masing-masing kelompok responden. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

pada literatur perpajakan dengan memperluas pemahaman mengenai faktor sosial dan psikologis yang berkaitan dengan penggelapan pajak sekaligus memberikan bukti empiris mengenai penggunaan mahasiswa dalam penelitian perilaku perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Tax Evasion* sebagai Keputusan yang Bersifat Perilaku dan Etis

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak melalui tindakan seperti penipuan, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan informasi yang relevan (Fisher, 2014). Penggelapan pajak mencerminkan bentuk perlawanan aktif terhadap perpajakan karena melibatkan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Oleh karena itu, penggelapan pajak bukan hanya merupakan masalah ekonomi dan hukum, melainkan juga masalah perilaku dan etika. Nickerson et al., (2009) menekankan bahwa individu mungkin memandang pajak sebagai beban yang mengurangi sumber daya ekonomi mereka, sehingga menciptakan insentif untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun, keputusan untuk melakukan penggelapan pajak juga dapat bergantung pada bagaimana individu menilai keberterimaan etis dari perilaku tersebut.

Pendekatan ekonomi konvensional menjelaskan kepatuhan pajak dan penggelapan pajak terutama melalui perhitungan manfaat finansial, beban pajak, probabilitas audit, dan potensi sanksi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi semata mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku pajak individu. Nasyaduk & McGee, (2006) serta Allingham & Sandmo, (1972) membahas penggelapan pajak dari perspektif ekonomi dan keuangan, sementara Slemrod, (2007) menekankan pentingnya penegakan aturan dalam memahami perilaku pajak. Akan tetapi, Aneyaw. et al., (2016) berpendapat bahwa pendekatan ekonomi tidak memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai penggelapan pajak. Senada dengan hal tersebut, Farrar et al., (2017) menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor psikologis dalam memahami keputusan terkait pajak.

Dari perspektif ini, karakteristik individu dapat mempengaruhi cara wajib pajak menilai konsekuensi ekonomi, sosial, dan etis dari penggelapan pajak. Penelitian ini berfokus pada gender dan religiusitas karena kedua karakteristik tersebut telah dibahas dalam penelitian perpajakan sebelumnya sebagai faktor yang berpotensi berkaitan dengan penilaian etis, evaluasi risiko, dan perilaku terkait pajak. Gender merupakan karakteristik sosial yang mungkin berkaitan dengan perbedaan dalam pengambilan keputusan dan penilaian etis, sedangkan religiusitas mencerminkan komitmen individu terhadap nilai-nilai dan keyakinan agama yang dapat menjadi pedoman bagi perilaku etis. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji gender dan religiusitas bukan sebagai variabel yang dimanipulasi secara eksperimental, melainkan sebagai karakteristik yang berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan penggelapan pajak.

2.2 *Gender dan Tax Evasion*

Gender merupakan karakteristik demografis dan sosial yang telah mendapat banyak perhatian dalam penelitian mengenai pengambilan keputusan etis dan perilaku perpajakan (McGee, 2014). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pria dan wanita mungkin memiliki perbedaan dalam hal nilai-nilai, proses pengambilan keputusan, dan penilaian terhadap isu-isu etis. Hogue et al., (2013) berpendapat bahwa perbedaan gender dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan terhadap isu-isu etis. Pada

konteks perilaku perpajakan, perbedaan semacam itu mungkin relevan karena penggelapan pajak melibatkan keputusan yang memadukan manfaat ekonomi dengan konsekuensi etis dan hukum.

Salah satu perspektif teoretis yang berguna untuk menjelaskan perbedaan ini adalah *Social Role Theory*. *Social Role Theory* menyatakan bahwa perbedaan perilaku antara pria dan wanita mungkin sebagian muncul dari peran dan harapan yang dikonstruksi secara sosial dan dikaitkan dengan gender. Peran-peran ini dapat memengaruhi orientasi perilaku individu, termasuk cara mereka merespons risiko dan menilai perilaku yang dipertanyakan secara sosial atau etis. Dengan demikian, gender tidak boleh ditafsirkan sebagai faktor yang secara mekanis menentukan perilaku individu; sebaliknya, harapan sosial yang terkait dengan gender dapat berkontribusi pada perbedaan kecenderungan perilaku.

Perspektif ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya Kastlunger et al., (2010) menemukan bahwa karakteristik yang terkait dengan gender relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak serta membedakan antara jenis kelamin biologis (*sex*) dan orientasi perilaku yang terkait dengan *gender*. Sommers, (2003) juga mengaitkan karakteristik maskulin tradisional dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil risiko, sedangkan karakteristik feminin tradisional dikaitkan dengan sikap yang lebih berhati-hati dan peka. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi relevan ketika individu menghadapi keputusan yang melibatkan potensi manfaat ekonomi dan risiko sanksi, sebagaimana halnya dalam kasus penghindaran pajak.

Dimensi etis dari perbedaan gender juga merupakan hal yang relevan. Hogue et al., (2013) mengemukakan bahwa pria dan wanita mungkin berbeda dalam hal sejauh mana pertimbangan etis disertakan dalam pengambilan keputusan. Pada konteks penggelapan pajak, individu yang lebih mengutamakan pertimbangan etis mungkin kurang bersedia untuk melakukan tindakan pelaporan pajak yang melanggar hukum. McGee, (2014) juga mengidentifikasi gender sebagai faktor demografis yang penting dalam penelitian mengenai sikap terhadap penghindaran pajak.

Namun, bukti empiris mengenai gender dan penggelapan pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Helmy, (2011) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara gender dan perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, Pasaribu & Tjen, (2016) serta Zakaria, (2019) tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan. Basri, (2015), yang menggunakan mahasiswa akuntansi sebagai responden, juga menemukan bahwa gender tidak memengaruhi penggelapan pajak secara signifikan. Temuan yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa hubungan antara gender dan penggelapan pajak perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan *Social Role Theory* dan bukti empiris yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini memperkirakan adanya hubungan antara gender dan perbedaan kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Secara khusus, partisipan laki-laki diperkirakan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan partisipan perempuan. Karena penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah pola tersebut konsisten di berbagai kelompok responden, hipotesis diuji secara terpisah untuk wajib pajak dan mahasiswa.

H1a: Wajib pajak laki-laki menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan wajib pajak perempuan.

H1b: Mahasiswa laki-laki menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa perempuan.

2.3 Religiusitas dan *Tax Evasion*

Religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang memegang teguh serta menerapkan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kum-Lung dan Kum-Lung & Tek-Chai, (2010) menggambarkan religiusitas sebagai faktor penting yang berkaitan dengan nilai-nilai etis dan perilaku individu. Worthington et al., (2003) mengonseptualisasikan komitmen keagamaan sebagai sejauh mana individu mematuhi nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan serta mengintegrasikan agama ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari perspektif ini, individu yang sangat religius diharapkan dapat mengevaluasi perilaku mereka melalui kerangka keagamaan dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Oleh karena itu, religiusitas dapat memberikan standar internal bagi individu untuk mengevaluasi perilaku etis. Agama umumnya diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial. Basri, (2015) berpendapat bahwa agama dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku tidak etis, sementara Boone et al., (2013) menggambarkan religiusitas sebagai keyakinan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen terhadap aturan dan nilai-nilai agama. Pada konteks penggelapan pajak, nilai-nilai yang telah terinternalisasi ini dapat memengaruhi persepsi individu mengenai apakah pengurangan pajak secara ilegal dapat diterima secara etis.

Argumen ini sangat relevan karena penggelapan pajak melibatkan pertimbangan ekonomi maupun etika. Meskipun individu mungkin memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengurangi jumlah pajak yang dilaporkan, penggelapan pajak melanggar peraturan perpajakan dan dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak etis. Dengan demikian, individu yang memiliki komitmen keagamaan lebih kuat cenderung lebih mempertimbangkan konsekuensi moral dari penggelapan pajak, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan tersebut.

Studi empiris sebelumnya memberikan dukungan terhadap argumen ini. Pope & Mohdali, (2010) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki relevansi dengan moral pajak dan sikap terkait pajak. Basri, (2015) juga mengaitkan religiusitas dengan perilaku etis dan penggelapan pajak. Temuan-temuan ini mengisyaratkan bahwa individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi mungkin memiliki batasan internal yang lebih kuat terhadap perilaku perpajakan yang tidak etis. Kendati demikian, bukti empiris yang ada belum memberikan hasil yang konklusif. Welch et al., (2005) dan McKerchar et al., (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara religiusitas dan penggelapan pajak. Khalil & Sidani, (2020), yang meneliti religiusitas dan penggelapan pajak dalam konteks berbeda, juga menemukan bahwa religiusitas bukanlah faktor penjas utama bagi sikap terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa religiusitas mungkin tidak menentukan perilaku perpajakan secara seragam dan bahwa hubungannya dengan penggelapan pajak memerlukan penyelidikan empiris lebih lanjut.

Berdasarkan argumen teoretis tersebut dan temuan yang beragam dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini memperkirakan bahwa individu dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah akan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi. Hubungan ini diuji secara terpisah pada kelompok wajib pajak dan mahasiswa.

H2a: Wajib pajak dengan tingkat religiusitas rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan wajib pajak dengan tingkat religiusitas tinggi.

H2b: Mahasiswa dengan tingkat religiusitas rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa dengan tingkat religiusitas tinggi.

2.4 Interaksi antara Gender dan Religiusitas dalam Penggelapan Pajak

Gender dan religiusitas mungkin tidak bekerja secara independen dalam menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak. Peran sosial yang terkait dengan gender dapat membentuk cara individu menyikapi risiko dan keputusan etis, sementara religiusitas dapat menyediakan kerangka kerja moral internal yang digunakan individu untuk mengevaluasi keputusan-keputusan tersebut. Akibatnya, implikasi perilaku dari gender mungkin bergantung, setidaknya sebagian, pada tingkat religiusitas individu tersebut.

Interaksi antara gender dan religiusitas menjadi sangat penting karena tingkat religiusitas yang tinggi tidak serta-merta menghilangkan semua perbedaan perilaku yang terkait dengan gender. Sebaliknya, nilai-nilai keagamaan dapat bekerja bersama karakteristik individu dan sosial lainnya dalam membentuk keputusan perilaku. Dengan demikian, hubungan antara gender dan kecenderungan penggelapan pajak dapat berbeda tergantung pada apakah individu memiliki tingkat religiusitas yang relatif rendah atau tinggi.

Literatur empiris yang ada juga memberikan dasar untuk mengkaji hubungan-hubungan ini secara bersamaan. Hogue et al., (2013) menekankan perbedaan dalam pengambilan keputusan etis antara pria dan wanita, sementara Kum-Lung dan Kum-Lung & Tek-Chai, (2010) serta Worthington et al., (2003) menyoroti peran komitmen keagamaan dalam membentuk nilai-nilai etis dan perilaku. Perspektif-perspektif ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku terkait gender dan komitmen keagamaan tidak harus dianggap sebagai pengaruh yang sepenuhnya independen.

Oleh karena itu, alih-alih hanya mengkaji apakah pria yang sangat religius memiliki kecenderungan penggelapan pajak yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang sangat religius, penelitian ini secara khusus mengkaji apakah gender dan religiusitas berinteraksi dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan pajak. Formulasi ini sejalan dengan metode ANOVA dua arah yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguji baik efek utama dari gender dan religiusitas maupun interaksi di antara keduanya.

H3a: Gender dan religiusitas berinteraksi dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan pajak di kalangan wajib pajak.

H3b: Gender dan religiusitas berinteraksi dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan pajak di kalangan mahasiswa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain komparatif untuk mengkaji hubungan antara gender, religiusitas, dan kecenderungan penggelapan pajak, serta membandingkan pola yang diperoleh antara wajib pajak dan mahasiswa. Penelitian ini melibatkan dua kelompok partisipan yaitu wajib pajak dan mahasiswa. Wajib pajak adalah individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan mahasiswa mewakili individu yang telah menerima pembelajaran perpajakan terkait perpajakan dan diharapkan menjadi wajib pajak di masa depan. Kedua kelompok tersebut diteliti secara terpisah untuk menilai apakah pola

serupa terkait gender, religiusitas, dan kecenderungan penghindaran pajak dapat diamati. Sampel akhir terdiri dari 303 partisipan, yang mencakup 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan gender dan religiusitas sebagai variabel independen. Gender dikodekan sebagai variabel kategorikal, dengan angka 1 mewakili peserta perempuan dan angka 2 mewakili peserta laki-laki. Religiusitas diukur menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Krauss et al., (2011). Instrumen ini dikembangkan untuk menilai religiusitas pada individu Muslim melalui lima dimensi: komitmen keagamaan, pengetahuan keagamaan, keyakinan keagamaan, praktik keagamaan, serta pengalaman atau penghayatan keagamaan. Respons diukur menggunakan skala Likert lima poin yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setelah memperoleh skor religiusitas, partisipan diklasifikasikan ke dalam kelompok religiusitas rendah dan tinggi berdasarkan nilai rata-rata sampel. Partisipan dengan skor di bawah rata-rata dikategorikan memiliki religiusitas rendah, sedangkan partisipan dengan skor di atas rata-rata dikategorikan memiliki religiusitas tinggi. Kategorisasi ini digunakan untuk analisis ANOVA dua arah.

Kecenderungan penghindaran pajak diukur menggunakan skenario pelaporan pajak hipotetis yang diadaptasi dari Lewis et al., (2009). Partisipan diminta untuk menentukan jumlah penghasilan yang akan dilaporkan dalam skenario tersebut. Jumlah penghasilan yang dilaporkan digunakan sebagai indikator kecenderungan partisipan terhadap penghindaran pajak. Jumlah penghasilan yang dilaporkan lebih rendah mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar untuk melaporkan penghasilan di bawah nilai sebenarnya dan, sebagai akibatnya, kecenderungan yang lebih besar terhadap penghindaran pajak.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis varians *Two-way (ANOVA)* dengan SPSS. *Two-way (ANOVA)* digunakan untuk menguji pengaruh utama gender, pengaruh utama religiusitas, serta efek interaksi antara jenis kelamin dan religiusitas terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Analisis dilakukan secara terpisah untuk wajib pajak dan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Gender	Religiosity	Wajib Pajak			Mahasiswa		
		Mean	Std. Dev	N	Mean	Std. Dev	N
Woman	Low religiosity	2.14	1.069	7	2.06	0.899	49
	High religiosity	3.75	0.786	20	3.04	1,184	95
	Total	3.33	1.109	27	2.71	1,188	144
Man	Low religiosity	1.88	0.641	8	1.91	0.836	69
	High religiosity	2.07	0.779	15	1.92	0.797	40
	Total	2.00	0.739	23	1.92	0.818	109
Total	Low religiosity	2.00	0.845	15	1.97	0.862	118
	High religiosity	3.03	1.150	35	2.71	1,196	135
	Total	2.72	1.161	50	2.37	1,114	253

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif mengenai kecenderungan penghindaran pajak berdasarkan kategori jenis kelamin dan religiusitas untuk sampel wajib pajak dan mahasiswa. Sampel akhir terdiri dari 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa. Di antara wajib pajak, 15 partisipan diklasifikasikan memiliki tingkat religiusitas rendah dan 35 partisipan memiliki tingkat religiusitas tinggi. Di antara mahasiswa, 118 partisipan diklasifikasikan memiliki tingkat religiusitas rendah dan 135 partisipan memiliki tingkat religiusitas tinggi.

Bagi wajib pajak, partisipan dengan religiusitas rendah melaporkan pendapatan rata-rata sebesar 2,00, sedangkan mereka yang memiliki religiusitas tinggi melaporkan rata-rata sebesar 3,03. Bagi mahasiswa, nilai rata-rata yang tercatat adalah 1,97 untuk kelompok religiusitas rendah dan 2,71 untuk kelompok religiusitas tinggi. Dengan demikian, partisipan dengan religiusitas rendah melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan dengan religiusitas tinggi pada kedua sampel tersebut. Klasifikasi religiusitas ke dalam kelompok religiusitas rendah dan tinggi didasarkan pada nilai rata-rata sampel, pendekatan ini mengikuti prosedur kategorisasi yang digunakan oleh Nadal et al., (2018).

Statistik deskriptif juga menunjukkan pola yang konsisten berdasarkan jenis kelamin. Pada kedua sampel (wajib pajak dan mahasiswa), partisipan laki-laki melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan perempuan. Karena pendapatan yang dilaporkan lebih rendah mencerminkan kecenderungan lebih besar untuk melaporkan pendapatan di bawah nilai sebenarnya dalam skenario pelaporan pajak hipotetis, pola deskriptif ini mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi di kalangan partisipan laki-laki.

Uji Validity dan Reliability

Table 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable Instruments	Wajib Pajak		Mahasiswa	
	Mark Corrected Item Total Correlation Lowest	Cronbach's alpha value	Mark Corrected Item Total Correlation Lowest	Cronbach's alpha value
Religiosity (X2)	0.367	0.885	0.367	0.885

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 2 menunjukkan nilai terendah *Corrected Item-Total Correlation* dimana pada wajib pajak instrumen $> r$ tabel 0,273 dan pada mahasiswa $> r$ table 0.123. Oleh karena itu,

setiap item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Tabel 2 juga menunjukkan nilai Cronbach's alpha variabel religiusitas lebih besar dari 0,60, dan disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan religiusitas dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Pengujian Hipotesis

Table 3. ANOVA Test Results Wajib Pajak

Source	Type III Sum Of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	35.665	3	11.888	17.980	0,000	0.540
Intercept	251.526	1	251.526	380.045	0,000	0.892
X1	9.901	1	9.901	14.974	0,000	0.246
X2	8.415	1	8.415	12.727	0,001	0.217
X1*X2	5.211	1	5.211	7.880	0,007	0.146
Error	30.415	46	0.661			
Total	436.000	50				
Corrected Total	66.080	49				

R Squared = 0.540 (Adjusted R Squared= 0.510)

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian antar subjek menunjukkan bahwa variabel gender mempunyai nilai F sebesar 14.974 dan signifikan secara statistik sebesar 0,000 yang berarti terdapat pengaruh antara Gender wajib pajak dengan penggelapan pajak. Tabel 3 di atas juga terlihat bahwa variabel Religiusitas mempunyai nilai F sebesar 12.727 dan signifikan pada taraf 0,001 yang berarti terdapat pengaruh antara religiusitas wajib pajak dengan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji antar subjek pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa interaksi variabel gender dan religiusitas dari wajib pajak mempunyai nilai F sebesar 7.880 dan signifikan pada taraf 0,007. Artinya terdapat pengaruh interaksi antara variabel gender dan religiusitas wajib pajak.

Table 4. ANOVA Test Results Mahasiswa

Source	Type III Sum Of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	69,913	3	23,304	23,889	0,000	0.223
Intercept	1135188	1	1,135,188	1,163,691	0,000	0.824
X1	22,732	1	22,732	23,303	0,000	0.086
X2	13,996	1	13,996	14,348	0,000	0.054
X1*X2	13,330	1	13,330	13,665	0,000	0.052
Error	242,901	249	0.976			
Total	1,731,000	253				
Corrected Total	312,814	252				

R Squared = 0.223 (Adjusted R Squared= 0.214)

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian antar subjek menunjukkan bahwa variabel gender mempunyai nilai F sebesar 23,303 dan signifikan secara statistik sebesar 0,000 yang berarti terdapat pengaruh antara Gender mahasiswa dengan penggelapan pajak. Tabel 4 di atas juga terlihat bahwa variabel Religiusitas mempunyai nilai F sebesar 14,348 dan signifikan pada taraf 0,000 yang berarti terdapat pengaruh antara religiusitas mahasiswa dengan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji antar subjek pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa interaksi variabel gender dan religiusitas dari mahasiswa mempunyai nilai F sebesar 13,665 dan signifikan pada taraf 0,000. Artinya terdapat pengaruh interaksi antara variabel gender dan religiusitas mahasiswa.

Berdasarkan hasil dari uji tabel 3 dan tabel 4 dapat kita lihat bahwa hasil antara uji dengan sampel wajib pajak dan hasil dengan sampel mahasiswa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dimana hasil dari tabel 3 dan tabel 4 adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara gender dengan penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel mahasiswa. Selain itu dari tabel 3 dan 4 juga mengasilkan terdapat pengaruh religiusitas dengan penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel mahasiswa. Berdasarkan tabel 3 dan 4 juga menghasilkan bahwa terdapat interaksi gender dan religiusitas terhadap penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel mahasiswa. Hasil uji terdapat pada tabel 3 untuk sampel wajib pajak dan tabel 4 untuk sampel mahasiswa tidak terdapat perbedaan hasil dengan sampel menggunakan wajib pajak maupun mahasiswa.

Tabel 5. Estimated Results

\		Wajib Pajak				Mahasiswa			
		Mean	Std. Error	95% Confidence Interval		Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound			Lower Bound	Upper Bound
Gender									
Women		2.947	0.179	2.587	3.306	2,552	0.087	2,381	2,723
Man		1.971	0.178	1.613	2.329	1,919	0.098	1,726	2,112
Religiosity									
Low religiosity		2.009	0.21	1.585	2.432	1,987	0.092	1,805	2,169
High religiosity		2.908	0.139	2.629	3.188	2,484	0.093	2,300	2,667
Gender	Religiosity	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval		Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound			Lower Bound	Upper Bound
Woman	Low religiosity	2.143	0.307	1.524	2.762	2,061	0.141	1,783	2,339
	High religiosity	3.75	0.182	3.384	4.116	3,042	0.101	2,843	3,242
Man	Low religiosity	1.875	0.287	1.296	2.454	1,913	0.119	1,679	2,147
	High religiosity	2.067	0.21	1.644	2.489	1,925	0.156	1,617	2,233

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Gender dan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti konsisten bahwa gender memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan penghindaran pajak, baik pada sampel wajib pajak maupun mahasiswa. Di kalangan wajib pajak, pengaruh utama gender terbukti signifikan secara statistik ($F = 14,974$; $p < 0,001$), dan pengaruh serupa juga ditemukan signifikan pada kelompok mahasiswa ($F = 23,303$; $p < 0,001$). Pada kedua sampel tersebut, partisipan laki-laki

melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan perempuan, yang mengindikasikan adanya kecenderungan lebih tinggi di kalangan laki-laki untuk melaporkan pendapatan di bawah nilai sebenarnya (*underreporting*).

Temuan ini mendukung argumen bahwa gender mungkin berkaitan dengan perbedaan dalam penilaian etis dan pengambilan keputusan. Hogue et al., (2013) mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan mungkin memiliki perbedaan dalam nilai-nilai serta orientasi pengambilan keputusan, sementara McGee, (2014) melaporkan bahwa perempuan cenderung kurang dapat menerima praktik penghindaran pajak. Senada dengan hal tersebut, Kastlunger et al., (2010) berpendapat bahwa perbedaan gender mungkin terkait dengan perbedaan orientasi risiko, di mana perempuan umumnya menunjukkan sikap lebih menghindari risiko (**risk aversion**). Perspektif-perspektif ini memberikan kemungkinan penjelasan mengapa partisipan laki-laki dalam penelitian ini melaporkan pendapatan yang lebih rendah dalam skenario pelaporan pajak.

Temuan ini juga sejalan dengan argumen Sommers, (2003), yang menyatakan bahwa perempuan mungkin menunjukkan kepekaan lebih tinggi terhadap pertimbangan interpersonal dan etis. Dalam konteks pelaporan pajak, pertimbangan semacam itu dapat mengurangi kesediaan seseorang untuk melaporkan pendapatan kena pajak di bawah nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa gender tetap menjadi karakteristik individu yang relevan dalam memahami kecenderungan penghindaran pajak, tidak hanya pada individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaporan pajak, tetapi juga pada mahasiswa yang belum memikul tanggung jawab perpajakan pada tingkat yang sama.

Namun, yang perlu diperhatikan, temuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa gender merupakan penyebab penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan desain komparatif kuantitatif, dan gender merupakan karakteristik yang terbentuk secara alami, bukan variabel yang dimanipulasi secara eksperimental. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat adalah bahwa gender memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan penghindaran pajak pada kedua sampel tersebut.

Religiusitas dan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh utama yang signifikan dari religiusitas terhadap kecenderungan penghindaran pajak pada kedua kelompok sampel. Pada kelompok wajib pajak, pengaruh religiusitas terbukti signifikan secara statistik ($F = 12,727$; $p = 0,001$), demikian pula pada kelompok mahasiswa ($F = 14,348$; $p < 0,001$). Estimasi rata-rata marginal menunjukkan bahwa partisipan dengan tingkat religiusitas rendah melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan dengan tingkat religiusitas tinggi pada kedua sampel tersebut.

Temuan ini mendukung pandangan bahwa religiusitas dapat berfungsi sebagai orientasi moral internal yang membentuk penilaian etis individu. Religiusitas mencerminkan sejauh mana individu menginternalisasi keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Worthington et al., 2003). Berdasarkan perspektif ini, individu dengan komitmen keagamaan yang lebih kuat cenderung menilai tindakan penghindaran pajak sebagai hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama mereka.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Pope & Mohdali, (2010) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat memengaruhi moral pajak dan kepatuhan pajak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Basri, (2015) yang menemukan adanya hubungan antara religiusitas dan perilaku etis dalam konteks kecurangan pajak. Demikian pula, Boone et al., (2013) menunjukkan relevansi religiusitas dalam memahami perilaku terkait pajak. Dalam penelitian ini, partisipan yang diklasifikasikan memiliki tingkat religiusitas lebih tinggi melaporkan

pendapatan yang lebih besar dalam skenario pelaporan pajak hipotetis, yang mengindikasikan kecenderungan lebih rendah untuk melaporkan pendapatan di bawah jumlah yang sebenarnya.

Namun, temuan ini juga perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang bertentangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, Welch et al., (2005) dan McKerchar et al., (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang berkaitan dengan religiusitas dan perilaku perpajakan. Khalil & Sidani, (2020) juga menyimpulkan bahwa religiusitas tidak serta-merta menjadi faktor penjas utama bagi sikap terhadap penghindaran pajak di Lebanon. Temuan-temuan yang kontras ini mengindikasikan bahwa peran religiusitas mungkin bergantung pada konteks kelembagaan, budaya, dan sosial tempat keputusan perpajakan diambil. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan sekadar menunjukkan bahwa religiusitas itu penting, melainkan memberikan bukti tambahan bahwa religiusitas berkaitan dengan kecenderungan penghindaran pajak dalam konteks Indonesia, serta bahwa pola ini muncul baik pada sampel wajib pajak maupun mahasiswa.

Interaksi antara Gender dan Religiusitas dalam Penggelapan Pajak

Temuan utama ketiga berkaitan dengan interaksi antara gender dan religiusitas. Efek interaksi tersebut signifikan secara statistik baik pada kelompok wajib pajak ($F = 7,880$; $p = 0,007$) maupun mahasiswa ($F = 13,665$; $p < 0,001$). Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan antara gender dan kecenderungan penghindaran pajak tidak terlepas dari faktor religiusitas. Dengan kata lain, asosiasi antara gender dan kecenderungan penghindaran pajak bervariasi bergantung pada tingkat religiusitas. Hal ini memberikan penjelasan yang lebih bernuansa dibandingkan jika gender dan religiusitas ditelaah sebagai dua prediktor yang terpisah.

Estimasi nilai rata-rata memberikan bukti deskriptif lebih lanjut mengenai interaksi ini. Di kalangan wajib pajak yang sangat religius, rata-rata pendapatan yang dilaporkan oleh perempuan ($M = 3,750$) lebih tinggi dibandingkan laki-laki ($M = 2,067$). Pola serupa tampak pada kelompok mahasiswa, di mana perempuan yang sangat religius melaporkan rata-rata sebesar 3,042 dibandingkan 1,925 pada laki-laki yang sangat religius.

Pola-pola ini mengisyaratkan bahwa perbedaan gender dalam kecenderungan penghindaran pajak mungkin tetap ada bahkan pada individu yang tergolong sangat religius. Namun, karena analisis ini melaporkan efek interaksi dari uji ANOVA dua arah (bukan uji efek sederhana yang terpisah untuk setiap kategori religiusitas), temuan tersebut sebaiknya ditafsirkan sebagai bukti adanya interaksi yang signifikan, dan bukan sebagai bukti definitif bahwa perbedaan gender di dalam kelompok dengan religiusitas tinggi itu sendiri signifikan secara statistik.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan religiusitas dengan perilaku penggelapan pajak pada kelompok wajib pajak maupun mahasiswa, dengan laki-laki serta responden dengan religiusitas rendah menunjukkan kecenderungan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan perempuan dan responden dengan religiusitas tinggi, sehingga H1a, H1b, H2a, dan H2b didukung. Selain itu, terdapat interaksi yang signifikan antara gender dan religiusitas pada kedua kelompok, yang menunjukkan bahwa hubungan gender dengan penggelapan pajak berbeda pada tingkat religiusitas yang berbeda, sehingga H3a dan H3b didukung. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan pola hasil yang konsisten antara wajib pajak dan mahasiswa; namun, karena kedua kelompok dianalisis secara terpisah, konsistensi tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa kedua kelompok secara statistik tidak berbeda atau dapat sepenuhnya

saling menggantikan sebagai sampel penelitian perpajakan. Hipotesis kedua bagian a (H2a) adalah wajib pajak dengan religiusitas rendah lebih cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan wajib pajak dengan religiusitas tinggi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak dengan sampel wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua bagian a (H2a) diterima. Hipotesis kedua bagian b (H2b) adalah mahasiswa dengan religiusitas rendah lebih cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa dengan religiusitas tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak dengan sampel mahasiswa. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua bagian b (H2b) diterima.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan dengan memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan faktor sosial dan moral, khususnya gender dan religiusitas, dengan kecenderungan penggelapan pajak serta menunjukkan pentingnya mempertimbangkan interaksi keduanya. Pola hasil yang konsisten antara mahasiswa dan wajib pajak juga memberikan tambahan bukti dalam diskusi mengenai penggunaan mahasiswa sebagai partisipan penelitian perpajakan, meskipun belum dapat menunjukkan kesetaraan kedua kelompok. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dilengkapi dengan edukasi dan komunikasi yang menekankan tanggung jawab moral, manfaat sosial pajak, dan konsekuensi penggelapan pajak, termasuk penguatan aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan perpajakan bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Namun, temuan penelitian ini tidak menjadi dasar untuk membedakan perlakuan administratif atau kebijakan perpajakan berdasarkan gender.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan temuan. Pertama, ketidakseimbangan ukuran sampel antara kelompok wajib pajak dan mahasiswa, yaitu masing-masing 50 dan 253 responden, membatasi keterbandingan dan kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan pada kedua kelompok. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan relatif seimbang. Kedua, informasi mengenai prosedur pengambilan dan perekrutan sampel yang terbatas menyebabkan representativitas sampel dan generalisasi temuan perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Ketiga, kecenderungan penggelapan pajak diukur menggunakan skenario pelaporan pajak hipotetis, sehingga temuan mencerminkan respons partisipan terhadap situasi hipotetis dan belum sepenuhnya merepresentasikan perilaku penggelapan pajak aktual. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih mendekati kondisi perpajakan nyata serta mengombinasikan kuesioner dengan metode pengumpulan data lainnya. Keempat, religiusitas dikategorikan ke dalam kelompok rendah dan tinggi berdasarkan nilai rata-rata, yang berpotensi mengurangi informasi mengenai variasi individual dalam religiusitas. Penelitian selanjutnya dapat mempertahankan religiusitas sebagai variabel kontinu untuk memperoleh estimasi hubungan yang lebih informatif. Kelima, analisis wajib pajak dan mahasiswa dilakukan secara terpisah, sehingga penelitian ini hanya menunjukkan konsistensi pola temuan di antara kedua kelompok dan belum menguji secara langsung apakah besaran hubungan gender dan religiusitas berbeda secara statistik antara wajib pajak dan mahasiswa. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain analitis yang secara eksplisit memasukkan jenis responden sebagai faktor untuk menguji perbedaan tersebut secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (2009). Getting the word out: Enforcement information dissemination and compliance behavior. *Journal of Public Economics*, 93(3–4), 392–402. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.10.007>
- Aneyaw., B., Oppong, A., Abruguah, L. A., & Ashalley, E. (2016). Informal sector tax

- compliance issues and the causality nexus between taxation and economic growth: Empirical evidence from Ghana. *Moderen Economy*, 1478–1497.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). Religiosity and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53–84. <https://doi.org/10.2308/atax-50341>
- Farrar, J., Kaplan, S., & Thornem, L. (2017). The effect of Interactional Fairness and Detection on Taxpayers Compliance Intentions. *Journal Business Ethics*.
- Fisher, J. (2014). Fairer Shores: Tax havens, tax avoidance, and Corporate Social Responsibility. *Boston University Law Review*, 94, 337–365.
- Fortin, B., Lacroix, G., & Villeval, M. C. (2007). Tax evasion and social interactions. *Journal of Public Economics*, 91(11–12), 2089–2112. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.03.005>
- Helmy, H. (2011). The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance. *Prosiding Internasional Conference on Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Substainability, Governance, and the Role of Small Business*.
- Helmy, H., Dwita, S., & Cheisviyanny, C. (2021). The Influence of Gender and Machiavellianism on Tax Evasion (A Study on Accounting Students). *Proceedings of the Sixth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2020)*, 179(Piceeba 2020), 89–93. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.013>
- Hogue, M., Levashina, J., & Hang, H. (2013). Will I Fake It? The Interplay of Gender, Machiavellianism, and Self-monitoring on Strategies for Honesty in Job Interviews. *Journal of Business Ethics*, 117(2), 399–411. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1525-x>
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 542–552. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.015>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100335>
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Krauss, S. E., Hamzah, A., Juhari, R., & Abd.Hamid, J. (2011). The Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPI): Towards Understanding Differences in the Islamic Religiosity among the Malaysian Youth. *Pertanika Journal Social Science & Humanity*, 13(2), 173–186.
- Kum-Lung, C., & Tek-Chai, L. (2010). Attitude Towards Ethics. *Attitude towards Business Ethics: Examining the Influence of Religiosity, Gender and Education Levels*, 2(1), 225–232. www.ccsenet.org/ijms
- Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., & Jones, P. (2009). Individual, cognitive and cultural differences in tax compliance: UK and Italy compared. *Journal of Economic Psychology*, 30(3), 431–445. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.11.002>
- Marriott, L. (2013). Using student subjects in experimental research: A challenge to the practice of using students as a proxy for taxpayers. *International Journal of Social Research Methodology*, 17(5), 503–525. <https://doi.org/10.1080/13645579.2013.786900>
- McGee, R. W. (2014). Gender and the ethics of tax evasion: An empirical study of 82 countries. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, 9781461412, 415–439. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_26

- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of tax morale: An exploratory study. *EJournal of Tax Research*, 11(1), 5–22.
- Nadal, A. R. C., Hardy, S. A., & Barry, C. M. N. (2018). Understanding the roles of religiosity and spirituality in emerging adults in the United States. *Psychology of Religion and Spirituality*, 10(1), 30–43. <https://doi.org/10.1037/rel0000104>
- Nasyaduk, I., & McGee, R. W. (2006). The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of Utah Opinion. In *SSRN Electronic Journal* (Number January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.934649>
- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1–14.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Pope, J., & Mohdali. (2010). The Role Of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum*, 25, 369–400.
- Satriya, A. (2024). *DJP: Pendapatan Pajak Tahun 2023 Tumbuh 4,3 Persen*. Radio Republik Indonesia.
- Slemrod, J. (2007). Cheating or Selves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economics Perspectives*, 21(1), 25–48.
- Sommers, C. H. (2003). Men-It's in Their Nature. *American Enterprise*, 14(6), 544–2494.
- Welch, M. R., Xu, Y., Bjarnason, T., Petee, T., O'Donnell, P., & Magro, P. (2005). “But everybody does it...”: The effects of perceptions, moral pressures, and informal sanctions on tax cheating. *Sociological Spectrum*, 25(1), 21–52. <https://doi.org/10.1080/027321790500103>
- Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84–96. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>
- Zakaria. (2019). Pengaruh Keadilan, Gender, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cengkareng). *Mercu Buana University Institutional Repository*.